

PEMBANGUNAN PEDESAAN

Prinsip, Kebijakan dan Manajemen

**Feliks Arfid Guampe, Umar, Ade Putra Ode Amane,
Muhammad Nur, Ardhana Januar Mahardhani,
Fachrul Husain Habibie, Andi Hartati, Dina Limbong Pamuttu,
Amruddin, Muh. Akbar, James Sinurat, Dasep Dodi Hidayah,
Dewi Sriastuti Nababan, Zainal Abidin**



PEMBANGUNAN PEDESAAN

Prinsip, Kebijakan dan Manajemen

**Feliks Arfid Guampe, Umar, Ade Putra Ode Amane,
Muhammad Nur, Ardhana Januar Mahardhani,
Fachrul Husain Habibie, Andi Hartati, Dina Limbong Pamuttu,
Amruddin, Muh. Akbar, James Sinurat, Dasep Dodi Hidayah,
Dewi Sriastuti Nababan, Zainal Abidin**



PEMBANGUNAN PEDESAAN (PRINSIP, KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN)

Tim Penulis:

Feliks Arfid Guampe, Umar, Ade Putra Ode Amane, Muhammad Nur, Ardhana Januar Mahardhani, Fachrul Husain Habibie, Andi Hartati, Dina Limbong Pamuttu, Amruddin, Muh. Akbar, James Sinurat, Dasep Dodi Hidayah, Dewi Sriastuti Nababan, Zainal Abidin.

Desain Cover:

Fawwaz Abbyan

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Evi Damayanti

ISBN:

978-623-459-236-8

Cetakan Pertama:

November, 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2022

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

Telpon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain rasa syukur, karena berkat rahmat dan karunia-Nya buku yang berjudul Pembangunan Pedesaan ini telah dapat di terbitkan untuk dapat dikonsumsi oleh khalayak banyak. Pembangunan Desa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa). UU tersebut menjabarkan definisi, tahapan, dan tujuannya. Terlaksananya pembangunan Pedesaan dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang ada di desa.

Pembangunan di desa perlu dilaksanakan dengan kerja sama yang baik dan semangat gotong royong antara pemerintah desa dengan masyarakat desa. Semua bahu-membahu memaksimalkan potensi desa yang ada untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Semangat tersebut wajib diimplementasikan di semua tahapan pembangunan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan tujuan untuk lebih memakmurkan kehidupan di desa. Pelaksanaan pembangunan merupakan salah satu agenda yang terus dilakukan pemerintah Desa Amin Jaya setiap tahunnya.

Program-program pembangunan tersebut disusun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun lembaga-lembaga pemerintahan desa. Pelaksanaan pembangunan diawali dengan perencanaan serta perancangan melalui sebuah forum musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan lembaga-lembaga masyarakat. Perencanaan pembangunan tentunya harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat, kebutuhan, serta peraturan yang berlaku. UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 78 ayat 1 menetapkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Maka buku yang berjudul Pembangunan Pedesaan ini hadir sebagai bagian dari upaya untuk menambah khazanah, diskusi sekaligus penguatan di bidang Pembangunan desa. Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, karena sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia, khususnya terkait Pembangunan Pedesaan.

November, 2022

Penulis

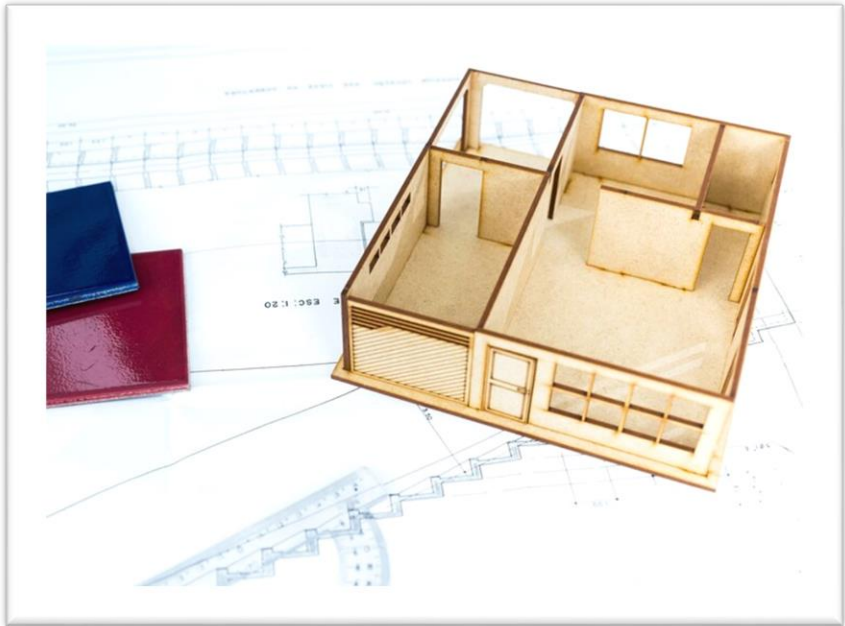
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENGERTIAN DAN URGANSI PEMBANGUNAN PEDESAAN	1
A. Pendahuluan.....	2
B. Pengertian Pembangunan	3
C. Pembangunan Daerah Pedesaan.....	5
D. Pentingnya Pembangunan Pedesaan	7
E. Tujuan Pembangunan Pedesaan	12
F. Rangkuman Materi	14
BAB 2 PEREKONOMIAN PEDESAAN INDONESIA	17
A. Pendahuluan.....	18
B. Kondisi Perekonomian Indonesia	19
C. Kondisi Perekonomian Pedesaan di Indonesia.....	20
D. Sumber Daya Alam (SDA) Pedesaan.....	23
E. Sumber Daya Manusia (SDM) Pedesaan Indonesia.....	25
F. Rangkuman Materi	27
BAB 3 BEBERAPA PARADIGMA PEMBANGUNAN PEDESAAN	31
A. Pendahuluan.....	32
B. Paradigma Developmentalisme	33
C. Paradigma <i>Rural Development</i>	35
D. Paradigma Pembangunan dan Pembangunan Pedesaan.....	40
E. Paradigma Pedesaan	43
F. Paradigma Pembangunan Yang Berkelanjutan (<i>Education For Sustainable Development</i>)	45
G. Paradigma <i>People Centered Development</i>	46
H. Paradigma Modernisasi	47
I. Paradigma Baru Tentang Pembangunan Negara Ketiga	51
J. Rangkuman Materi	53
BAB 4 INDIKATOR PEMBANGUNAN PEDESAAN.....	57
A. Pendahuluan.....	58
B. Kapasitas Aparatur Desa dan Jangkauan Pelayanan	59
C. Sarana dan Prasarana Perekonomian Desa.....	60

D. Kekayaan dan Keuangan Desa	61
E. Akses Informasi Memadai	62
F. Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Desa	62
G. Kesejahteraan Masyarakat	63
H. Pendidikan Masyarakat	64
I. Kesehatan Masyarakat	64
J. Rangkuman Materi	65
BAB 5 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEDESAAN	69
A. Pendahuluan	70
B. Kebijakan Pembangunan	70
C. Manajemen Pembangunan	72
D. Kebijakan Kerja Sama Antar Daerah Dalam Pembangunan Pedesaan	74
E. Kebijakan Pengembangan Wilayah Berbasis Lokalitas	76
F. Rangkuman Materi	78
BAB 6 STRATEGI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	83
A. Pendahuluan	84
B. Pembangunan Berkelanjutan	86
C. Rangkuman Materi	97
BAB 7 INSTRUMEN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEDESAAN	101
A. Pendahuluan	102
B. Instrumen Kebijakan Pembangunan Desa	104
C. Rangkuman Materi	110
BAB 8 PROGRAM PEMBANGUNAN PEDESAAN BERORIENTASI PERTUMBUHAN	113
A. Pendahuluan	114
B. Pembangunan Pedesaan	115
C. Pertumbuhan Ekonomi	117
D. Program Pembangunan Pedesaan Berorientasi Pertumbuhan	126
E. Rangkuman Materi	129
BAB 9 PROGRAM PEMBERANTASAN KEMISKINAN DAN PENANGGUHAN	133
A. Kemiskinan	134
B. Ruang Lingkup Kemiskinan	134

C. Pemberantasan Kemiskinan	137
D. Rangkuman Materi	143
BAB 10 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
ALAM DAN INFRASTRUKTUR	145
A. Pendahuluan	146
B. Potensi Sumber Daya Alam (SDA) Desa	147
C. Infrastruktur	156
D. Program – program Infrastruktur Yang Menunjang Sumber Daya Alam Desa	161
E. Rangkuman Materi	162
BAB 11 PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEDESAAN	171
A. Pendahuluan	172
B. Penataan Ruang	173
C. Penataan Ruang Desa	175
D. Perencanaan	177
E. Pembangunan	180
F. Perencanaan Pembangunan Pedesaan	182
G. Rangkuman Materi	184
BAB 12 LEMBAGA YANG BERWENANG UNTUK	
PEMBANGUNAN PEDESAAN	189
A. Pendahuluan	190
B. Tinjauan Historis Pembangunan Perdesaan	191
C. Peran Lembaga Desa Dalam Pembangunan	195
D. Perencanaan Pembangunan Perdesaan	197
E. Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan	198
F. Kelembagaan Desa	200
G. Rangkuman Materi	205
BAB 13 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PEDESAAN	211
A. Pendahuluan	212
B. Pembiayaan	213
C. Pembangunan	217
D. Rangkuman Materi	227
BAB 14 IMPLEMENTASI, MONITORING DAN EVALUASI	
PEMBANGUNAN PEDESAAN	231
A. Pembangunan Pedesaan	232

B. Kebijakan Pembangunan Desa	233
C. Implementasi Pembangunan Desa Melalui Dana Desa dan Alokasi Desa	235
D. Prioritas Pemanfaatan Dana Desa	238
E. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa	241
F. Rangkuman Materi	246
GLOSARIUM	249
PROFIL PENULIS	254



PEMBANGUNAN PEDESAAN

BAB 1: PENGERTIAN DAN URGANSI PEMBANGUNAN PEDESAAN

Dr. Feliks Arfid Guampe, S.E., M.Si

Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Tentena

BAB 1

PENGERTIAN DAN URGANSI PEMBANGUNAN PEDESAAN

A. PENDAHULUAN

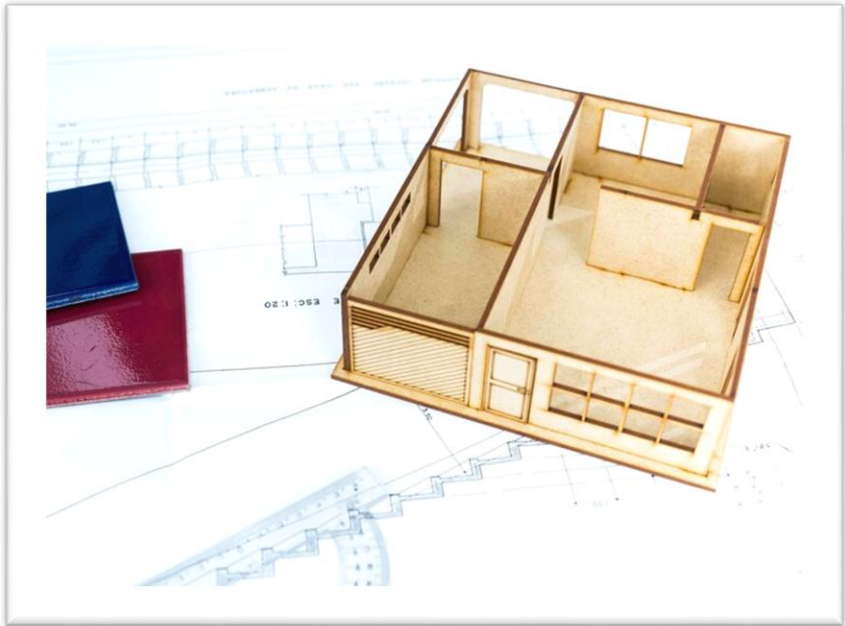
Pembangunan merupakan sebuah keharusan di dalam satu wilayah baik itu negara, daerah (Kabupaten atau Kota) dan bahkan di tingkat pedesaan. Dewasa ini, pembangunan pedesaan begitu penting sehingga perlu menjadi perhatian khusus. Perhatian khusus terhadap pembangunan pedesaan di Indonesia ditunjukkan dengan terimplementasinya undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014.

Sebelum membahas tentang paradigma pembangunan pedesaan, indikator pembangunan pedesaan, kebijakan pembangunan pedesaan, strategi pembangunan pedesaan, program pembangunan pedesaan sampai pada implementasi, monitoring dan evaluasi pembangunan pedesaan terlebih dahulu perlu dipahami beberapa hal berikut: pertama, pembangunan pedesaan merupakan bagian dari pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Oleh karena itu diperlukan keselarasan pembangunan antar tingkatan baik desa, daerah dan nasional dengan tidak mengesampingkan ciri khas masing-masing wilayah. Terciptanya keselarasan pembangunan antar tingkatan tersebut akan mempermudah pencapaian tujuan utama pembangunan yakni kesejahteraan masyarakat.

Kedua, pembangunan pedesaan penting karena sebagian besar masalah-masalah pembangunan berada di daerah pedesaan. Masalah tersebut apabila tidak mendapat penanggulangan serius akan berdampak pada pembangunan nasional. Adapun masalah-masalah pembangunan pedesaan antara lain kemiskinan, masalah sumber daya manusia dan pengangguran, serta infrastruktur dan kelembagaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2005). *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah* (Pertama). Graha Ilmu.
- Adisasmita, R. (2013). *Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Graha Ilmu.
- Arsyad, L., Satriawan, E., Mulyo, J. H., & Fitradhy, A. (2011). *Strategi Pembangunan Perdesaan Berbasis Lokal*. UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Eko, S. (2014). Desa Membangun Indonesia. In *Academia.Edu*.
- Reitsma, H. A., & Kleinpenning, J. M. G. (1989). *The Third World in Perspective*. Van Gorcum.
- Tambunan, M. (2010). *Menggagas Perubahan Pendekatan Pembangunan: Menggerakkan Kekuatan Lokal Dalam Globalisasi Ekonomi* (Pertama). Graha Ilmu.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi*. Penerbit Erlangga.



PEMBANGUNAN PEDESAAN

BAB 2: PEREKONOMIAN PEDESAAN INDONESIA

Umar, S.E., M.S.E

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

BAB 2

PEREKONOMIAN PEDESAAN INDONESIA

A. PENDAHULUAN

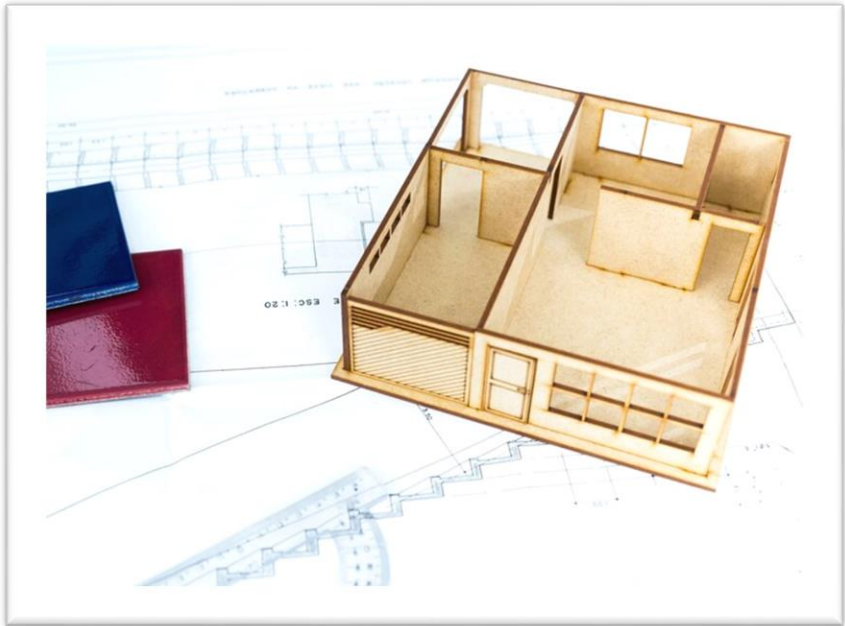
Kondisi perekonomian perdesaan begitu jauh dengan perkotaan. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan pengelolaan sektor ekonomi. Perekonomian perkotaan lebih dominan digerakkan oleh sektor industri dan jasa. Hal tersebut membuat investasi di perkotaan begitu besar dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Perekonomian perdesaan di Indonesia lebih cenderung digerakkan oleh sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Secara kuantitatif, dapat menyerap tenaga kerja yang tinggi. Namun, tingkat pendapatan masyarakat desa cenderung lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat kota. Perbedaan pengelolaan sektor ekonomi tersebut membuat adanya ketimpangan ekonomi antara perdesaan dengan perkotaan. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi perdesaan perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang menjadi penghambat percepatan ekonomi secara nasional. Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah harus bersinergi dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan ekonomi. (Arfianto & Balahmar, 2014).

Strategi pembangunan perekonomian desa saat ini berjalan dengan baik. Program-program dalam peningkatan ekonomi desa telah dilakukan. Program tersebut berupa pemberian dana 1 Milyar per desa dalam satu tahun. Hal tersebut diharapkan dapat menggerakkan perekonomian desa melalui program-program pemberdayaan dan menciptakan siklus ekonomi berkelanjutan. Selain itu, program pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) menjadi program penting dalam pembangunan desa. BUMDES diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga pengangguran dapat diminimalisir. BUMDES juga diharapkan dapat menciptakan nilai tambah dari aktivitas-aktivitas ekonomi kreatif. Apabila hal tersebut dapat berjalan dengan baik, maka pembangunan desa dapat

DAFTAR PUSTAKA

- Annabi, N., Harvey, S., & Lan, Y. (2011). *Public expenditures on education, human capital and growth in Canada: An OLG model analysis. Journal of Policy Modeling*, 33(6), 852-865.
- Arfianto, A. E. W., & Balahmar, A. R. U. (2014). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 2(1), 53-66. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v2i1.408>
- Bergh, A., & Fink, G. (2009). Higher education, elite institutions and inequality. *European Economic Review*, 53(3), 376-384. <https://doi.org/10.1016/j.euroeconrev.2009.01.001>
- Castellò, A., & Doménech, R. (2002). Human Capital Inequality and Economic Growth: Some New Evidence, 1 The Economic Journal, 112. C187M200.
- Elmira, E., Izzati, R. Al, Warda, N., Rizky, M., & Nurbani, R. (2016). Dinamika Ketimpangan dan Penghidupan di Pedesaan Indonesia. *Smeru Research Institute*, 2006-2016.
- Morse, S., Mc Namara, N., & Acholo, M. (2009). *Sustainable Livelihood Approach: A critical analysis of theory and practice*. University of Reading.
- Nakamura, T., & Murayama, Y. (2011). Education cost, intergenerational mobility, and income inequality. *Economics Letters*, 112(3), 266-269.
- Pieters, J. (2011). Education and household inequality change: a decomposition analysis for India. *Journal of Development Studies*, 47(12), 1909-1924.
- Ridlwani, Z. (2015). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 424-440. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314>
- Setiawan, A., & Alikodra, H. (2001). Tinjauan Terhadap Pembangunan Sistem Kawasan Konservasi di Indonesia. *Media Konservasi*, 7(2), 39-46.
- Sylwester, K. (2000). Income inequality, education expenditures, and growth. *Journal of development economics*, 63(2), 379-398.

- Yalang, R. (2017). *Hasil Sensus Pertanian 2013 (Angka Sementara) Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Di Indonesia. 2013.*
- Yang, J., & Qiu, M. (2016). The impact of education on income inequality and intergenerational mobility. *China Economic Review*, 37, 110-125.



PEMBANGUNAN PEDESAAN

BAB 3: BEBERAPA PARADIGMA PEMBANGUNAN PEDESAAN

Ade Putra Ode Aman, S.Sos., M.Si

Universitas Muhammadiyah Luwuk

BAB 3

BEBERAPA PARADIGMA PEMBANGUNAN PEDESAAN

A. PENDAHULUAN

Makna pembangunan telah ditafsirkan secara berbeda oleh para ahli yang berbeda. Pembangunan didefinisikan oleh Todaro dan Smith dalam (Kurniullah, Ardhariksa, Zukhruf ; Saragih, Annisa, Ilmi et al., 2021) sebagai proses multidimensi dengan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap demografi dan institusi nasional, serta ekonomi Pertumbuhan meliputi: Mengurangi ketimpangan dan memerangi kemiskinan absolut. Kebanyakan ilmuwan membuat teori tentang tren perkembangan pembangunan, bagaimana mencapainya dan bagaimana mencegahnya.

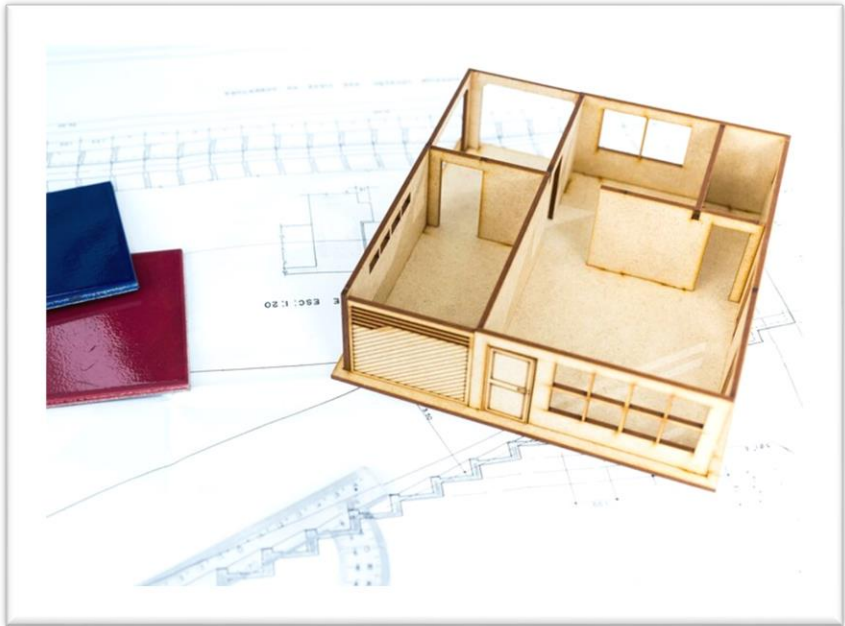
Paradigma pembangunan nasional Indonesia ialah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya. Yang dimaksud pembangunan manusia Indonesia seutuhnya adalah pembangunan non-fisik dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Sedangkan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya berarti pembangunan baik fisik maupun non-fisik dilakukan secara merata di seluruh wilayah Republik Indonesia. Akan tetapi, pada kenyataannya pembangunan di Indonesia baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia belum dilakukan secara merata, (Rahman & Novitasari, 2018)

Pembangunan desa adalah implementasi pembangunan yang lebih inklusif. Pembangunan desa membutuhkan proses yang memfasilitasi sinkronisasi antar sektor dan aktor serta mendorong inovasi. Salah satu model yang paling terkenal dalam teori ialah paradigma developmentalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Hatu, R. (2013). Sosiologi Pembangunan. In *sosiologi Pembangunan*.
- Diprose, R., Savirani, A., Setiawan, K. M. ., & Francis, N. (2020). *Aksi Kolektif Perempuan dan Pelaksanaan Undang-Undang Desa*.
- Dr. Murdiyanto, E. (2020). *Sosiologi Perdesaan Pengantar untuk Memahami Masyarakat Desa* (Revisi).
- Hastangka, H., Tjahyadi, S., Djalul Sembada, A., & Sinaga, Y. T. (2019). Education for Sustainable Development (ESD) – Pancasila di Desa Towangsan: Paradigma Pembangunan yang Berkelanjutan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)*, 4(2), 159–170. <https://doi.org/10.22146/jpkm.30134>
- Irawan, E. (2020). Pembangunan Pedesaan Melalui Pendekatan Kebijakan Local Economic Development Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Desa. *Nusantara Journal of Economics*, 2(2), 38–52.
- Khoerunnisa, F. N. (2013). Pengaruh Pembangunan Nasional Terhadap Pembangunan Desa. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Kurniullah, Ardhariksa, Zukhruf; Saragih, Annisa, Ilmi, F., Wisnujati; Amruddin, Hisarma Nugrahini, S. S. I. M. M. Y., & Hasnidar, Daud, J. H. P. (2021). *Pembangunan dan Perubahan Sosial* (Issue 1). Yayasan Kita Menulis.
- Nasution, R. D. (2016). Effect of Digital Divide on Rural Development. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 20(1), 31–44.
- Nugroho, A., & Hermawan, S. (2020). Paradigma Pembangunan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 3(2), 1–15. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4001>
- Rahman, A. Z., & Novitasari, D. (2018). Kebijakan pembangunan desa melalui pembangunan infrastruktur transportasi dalam upaya pemerataan pembangunan. *Gema Publica*, 3(2), 85–91.

- Rohma, M. (2021). Pembangunan Desa Lewat Pemeliharaan Infrastruktur Dukung Pembangunan Desa Lebih Inklusif. *Jurnal Sosial Politik Integratif*, 1(1), 61–71.
- Syafingi, H. M., Dewi, D. A. S., & Aji, A. B. (2018). Paradigma Aparatur Desa dalam Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat. *Pandecta: Research Law Journal*, 13(2), 139–149. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i2.16020>
- Zuliyah, S. (2010). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Menunjang Pembangunan Daerah. *Journal of Rural and Development*, 1(2), 151–160.



PEMBANGUNAN PEDESAAN

BAB 4: INDIKATOR

PEMBANGUNAN PEDESAAN

Muhammad Nur, S.E., M.Si

Universitas Muhammadiyah Parepare

BAB 4

INDIKATOR PEMBANGUNAN PEDESAAN

A. PENDAHULUAN

Problem mendasar bagi suatu bangsa atau negara adalah mencari wujud kondisi masyarakat secara ideal dan bagaimana cara merealisasikannya. Berbagai konsep dilakukan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan pada seluruh warga negara menuju kondisi yang lebih baik.

Secara historis sejak Indonesia mengawali kemerdekaannya, pembangunan desa telah menjadi fokus perhatian pemerintah, namun strategi pembangunan desa dari waktu ke waktu sering kali mengalami perubahan sesuai periode pembangunan.

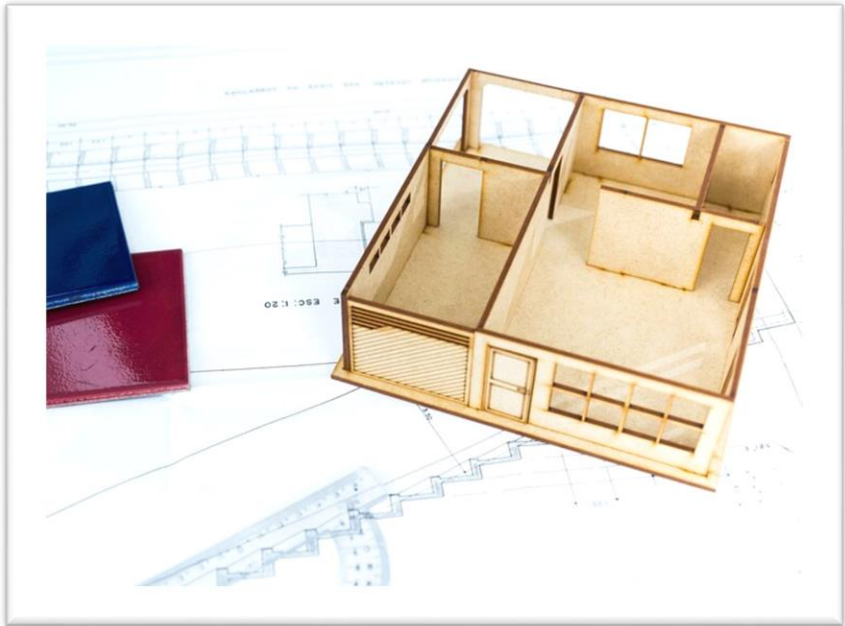
Kehadiran Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai tonggak awal percepatan pembangunan desa. Kondisi ini memberikan paradigma baru bagi pemerintah desa dalam memahami sistem keuangan dan pemberdayaan masyarakat, untuk mendorong pemerintah desa bekerja dengan baik.

Setelah Undang-undang No. 6 Tahun 2014 ditetapkan, anggaran dana desa naik drastis sehingga menjadi harapan baru meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, melalui penguatan ekonomi ,jaringan komunikasi dan revitalisasi sosial budaya.

Berdasarkan data Indeks Membangun Desa (IDM) Kemendes PDTT terjadi peningkatan persentase untuk kemajuan dan kemandirian desa dari 2019-2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Era in Indonesia: A Pilot Piject in Klaten Regency, Central Java. Paperpresented in the 38th Conference of the Federation of ASEAN Economic Associations (FAEA), Singapore, 27th 29th November.*
<https://kemendes.go.id/berita/view/detil/4351/sdgs-desajadi-arah-kebijakan-pembangunan-desahingga-2030>
- Mulyanto. (2013). *The Model of Index for Massuring the Progress of Rural Development at Autonomy*
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Sonny Harry B. Harmadi¹., Udin Suchaini²., Ardi Adji., (2000). Indikator Pembangunan Desa di Indonesia: Ditinjau dari Ketidaksesuaian indikator Pengukuran Pembangunan Desa
- Umar Udhin (2019). *Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistori*. Makassar : Garis Khatulistiwa



PEMBANGUNAN PEDESAAN

BAB 5: KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEDESAAN

Dr. Ardhana Januar Mahardhani, MKP
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

BAB 5

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEDESAAN

A. PENDAHULUAN

Pembangunan masih menjadi basis dalam rangka kemajuan bangsa, dalam kenyataannya keberlanjutan sektor lain seperti industri atau jasa juga akan selalu dipengaruhi oleh keberlangsungan sektor pertanian. Pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi hasil saja, tetapi juga memperhatikan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) yang ada di wilayahnya. Pembangunan pertanian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, serta memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Proses pembangunan ini lebih dikhususkan pada daerah perdesaan yang mayoritas penduduknya bekerja pada sektor pertanian. Menurut United Nations (Rustiadi & Pranoto, 2007), pembangunan perdesaan adalah strategi yang direncanakan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat miskin. Di dalam perencanaan dan pelaksanaan kerja sama daerah, perlu diperkuat wawasan dan komitmen pemerintah daerah tentang pentingnya kerja sama kewilayahan guna mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing. Persamaan visi pemerintah daerah adalah modal dasar dalam mewujudkan rencana dimaksud sehingga diperlukan kesadaran kolektif bahwa keberhasilan dalam melakukan percepatan dan pemerataan pembangunan daerah tidak terlepas dari konektivitas dan sinkronisasi rencana pembangunan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

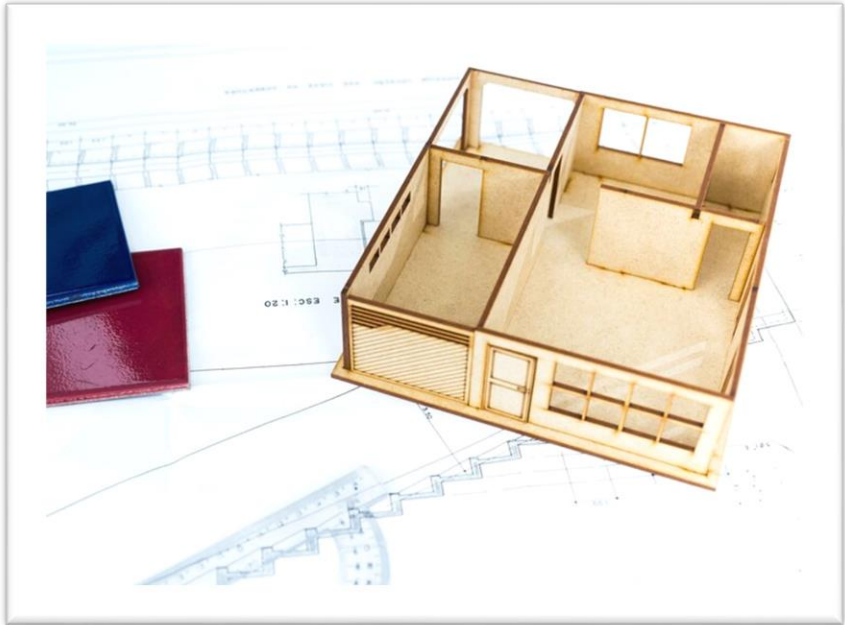
B. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Istilah kebijakan atau *policy* menurut Graycar dapat dipandang dari perspektif filosofis, produk, proses, dan kerangka kerja. Sebagai suatu 'konsep' filosofis, kebijakan dipandang sebagai serangkaian prinsip, atau

DAFTAR PUSTAKA

- Aripin, M. Z. (2018, March 5). *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa*. <https://Csws.Fisip.Unair.Ac.Id.https://csws.fisip.unair.ac.id/2018/03/partisipasi-masyarakat-dalam-perencanaan-pembangunan-desa-mohamad-zainul-aripin/>
- Damayanti, R. (2017). *ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA GUNA MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan.
- Domai, T. (2011). *SOUND GOVERNANCE*. UB Press.
- Hirawan, Z. (2018). *PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KABUPATEN SUBANG. KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN KOTA BERWAWASAN KESEHATAN*.
- Mahardhani, A. J. (2014). *Strategi Pembangunan Desa*. Unmuh Ponorogo Press.
- Mahardhani, A. J. (2018). *Advokasi Kebijakan Publik*. CALINA MEDIA.
- Mahardhani, A. J. (2022). *STRATEGI KERJA SAMA ANTARDAERAH SELINGKAR WILIS PROVINSI JAWA TIMUR*. Qiara Media.
- Mukmin. (2014, January). *Peran Pertanian Penting untuk Pembangunan Daerah*. <https://www.kaltimprov.go.id/berita/peran-pertanian-penting-untuk-pembangunan-daerah>
- Nadhifah, D., & Kresna Sakti, R. (2019). *ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, KETIMPANGAN PENDAPATAN, DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN (Studi Pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 7(2). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5484>
- Nugroho, I., & Dahuri, R. (2004). *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. LP3ES.
- Rustiadi, E., & Pranoto, S. (2007). *Agropolitan: Membangun Ekonomi Perdesaan*. Crestpent Press. <https://books.google.com/books/about/Agropolitan.html?hl=id&id=eWbtAAAAMAAJ>

- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2009). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Yayasan Obor Indonesia.
https://books.google.com/books/about/Perencanaan_dan_Pengembangan_Wilayah.html?hl=id&id=vW6rDAAAQBAJ
- Setiawan, D. (2021). *Neraca Keadilan Ekonomi*. <https://www.uinjkt.ac.id/>.
<https://www.uinjkt.ac.id/neraca-keadilan-ekonomi/>
- Trigunasih, N. M. (2014). *Pengembangan Sentra Komoditas Unggulan Tanaman Pangan, Perkebunan, Hortikultura, Kehutanan dan Peternakan Secara Terpadu di Kabupaten Gianyar*. Swasta Nulus.



PEMBANGUNAN PEDESAAN

BAB 6: STRATEGI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Ir. Fachrul Husain Habibie, M.M

Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti

BAB 6

STRATEGI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

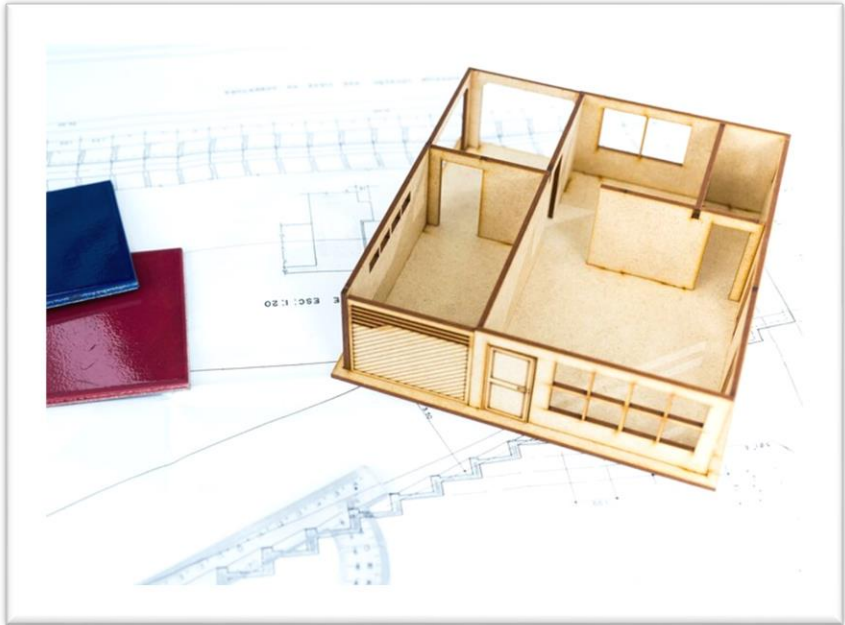
A. PENDAHULUAN

Di tengah tantangan global seperti kemiskinan, bencana alam, perubahan iklim dan krisis keuangan, isu pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada integrasi pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan menjadi tantangan serius bagi para pembuat kebijakan di semua negara. Tanpa upaya secara global untuk mengubah pola pembangunan tradisional, eksplorasi sumber daya alam dan lingkungan maka hanya akan meningkat dampak negative dari sebuah pembangunan. Dampak nyata dari produksi melebihi ambang batas daya dukung adalah kekeringan berkepanjangan, kenaikan muka air laut dan kondisi cuaca ekstrim. Salah satu isu utama dalam pembangunan ekonomi adalah bagaimana mengelola keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan pembangunan di satu sisi dan upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan di sisi lain. Pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam tanpa mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap lingkungan itu sendiri. Hal ini karena sumber daya alam dan lingkungan secara inheren terbatas daya dukungnya. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi yang tidak mempertimbangkan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menimbulkan masalah pembangunan di masa depan.

Konsep pembangunan berkelanjutan sebenarnya telah menjadi perhatian para ahli sejak lama. Tetapi istilah keberlanjutan itu sendiri baru berusia beberapa dekade, baru pada tahun 1798 Malthus mulai memperhatikan keberlanjutan. Malthus prihatin dengan ketersediaan lahan di Inggris karena ledakan populasi yang cepat. Satu setengah abad kemudian, setelah Meadow dan rekan-rekannya menerbitkan makalah berjudul *The Limit to Growth* (Meadow et al., 1972) pada tahun 1972, kekhawatiran tentang keberlanjutan ini semakin menguat, dan

DAFTAR PUSTAKA

- Basiago, A. D. (1999). *Economic, social, and environmental sustainability in development theory and urban planning practice: The environmentalist*. Boston: Kluwer Academic Publishers.
- Dennis L, Meadow et al., 1972, 1972, *The Limit to Growth and Basic Need*, Potomac Associates Book
- Justice Mensah, 2019, *Sustainable development: Meaning, history, principles, pillars, and implications for human action: Literature review*
- Mensah, J., & Enu-Kwesi, F. (2018). *Implication of environmental sanitation management in the catchment area of Benya Lagoon, Ghana*. *Journal of Integrative Environmental Sciences*. doi:10.1080/1943815x.2018.1554591
- Reyes, G. E. (2001). *Four main theories of development: modernization, dependency, world-system, and globalization*. *Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas*, 4(2), 109–124. University of Pittsburgh, USA.
- Stoddart, H., Schneeberger, K., Dodds, F., Shaw, A., Bottero, M., Cornforth, J., & White, R. (2011). A pocket guide to sustainable development governance. Stakeholder Forum 2011.
- Thomas, C. F. (2015). *Naturalizing Sustainability Discourse: Paradigm, Practices, and Pedagogy of Thoreau, Leopold, Carson, and Wilson*:
- Tipps, D. (1976). *Modernization theory and the comparative study of societies: A critical perspective* (pp. 65–77). New York: Free Press.
- Todaro. Michael P. & Smith. Stephen C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi ke 9. Jakarta: Erlangga.
- Laporan *United Nations “The Sustainable Development Goals Report 2022”*



PEMBANGUNAN PEDESAAN

BAB 7: INSTRUMEN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEDESAAN

Andi Hartati, S.Sos, M.A

Universitas Tompotika Luwuk

BAB 7

INSTRUMEN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEDESAAN

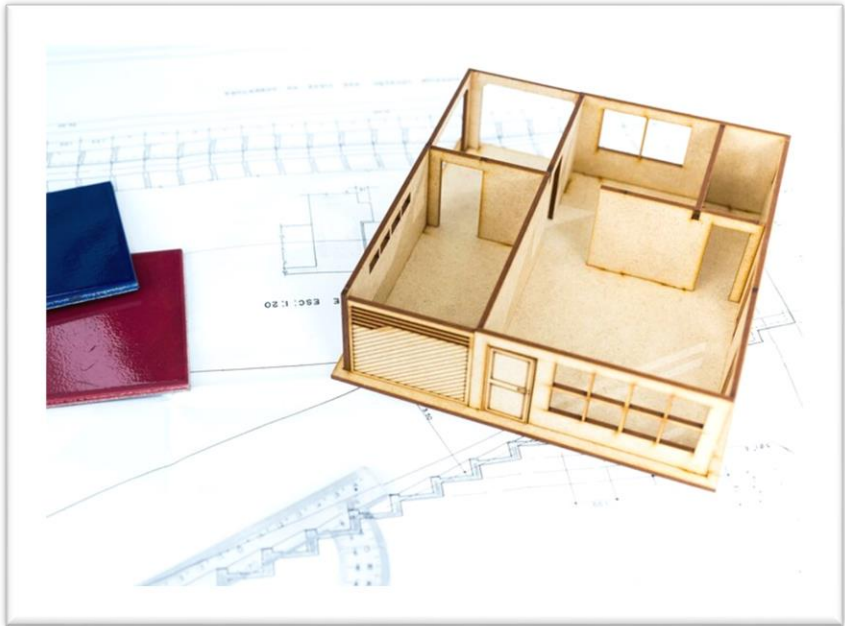
A. PENDAHULUAN

Kondisi pedesaan digambarkan dengan aktivitas masyarakat yang sebagian besar bertumpu pada kegiatan berbasis sumber daya alam terutama pertanian. Namun, keunggulan yang dimiliki daerah pedesaan ini tidak serta merta menempatkan pedesaan tumbuh dan berkembang sejajar dengan daerah perkotaan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan daerah pedesaan sulit untuk sejajar dengan perkotaan, yakni disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia dan ketersediaan infrastruktur (Adisasmita, 2006). Namun, ada faktor yang lebih berpengaruh dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya daerah pedesaan yakni peran pemerintah, hal ini dikarenakan pemerintah memiliki kewenangan yang sifatnya pembuat kebijakan dan pelaksana program pembangunan pedesaan.

Pada dasarnya pembangunan berusaha untuk menciptakan peningkatan kualitas kehidupan dan ekonomi ke arah yang lebih wajar dari waktu ke waktu, demikian pula pembangunan pedesaan yang berusaha memberikan dan menciptakan peningkatan kehidupan masyarakat pedesaan berdasarkan potensi dan kemampuan yang dimiliki daerah pedesaan. Menurut *Office of Deputy Prime Ministry Republic of United Kingdom* (2004) untuk mewujudkan hal tersebut dapat ditempuh melalui: (1) menjamin masyarakat mendapat tempat tinggal yang layak; (2) pertumbuhan ekonomi yang menerus membuat diversifikasi; dan (3) memberi perlindungan terhadap keterbukaan antara daerah pedesaan dan perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan pedesaan dan perkotaan: Konsep dan model community development*.
https://books.google.com/books/about/Pembangunan_pedesaan_dan_perkotaan.html?hl=id&id=08jZAAAAMAAJ
- Awan Y. Abdoellah, Y. R. (2016). *TEORI DAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK*. Alfabeta Bandung.
- Deputi Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan K. K. K. B. P. M. dan K. R. I. (2017). *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa*.
- Kemendesa.go.id. (2015). *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan*. 1–94.
- Kessa, W. (2015). Buku 6 : Perencanaan Pembangunan Desa. In *Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia*.
- Pratiwinegara, A. I. (2015). Studi Instrumen Kebijakan Gerakan Terpadu Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Lingkungan, Infrastruktur (Gerdu Kempling) Kelurahan Bulusan Kota Semarang. *Indonesian Journal of Public Policy and Management Review*, 4(2), 287–296.
- Rohman, H. (2015). *Kapasitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa kabupaten bondowoso*. 111, 19–35.



PEMBANGUNAN PEDESAAN

BAB 8: PROGRAM PEMBANGUNAN PEDESAAN BERORIENTASI PERTUMBUHAN

Dina Limbong Pamuttu, S.T., M.T

Universitas Musamus

BAB 8

PROGRAM PEMBANGUNAN PEDESAAN BERORIENTASI PERTUMBUHAN

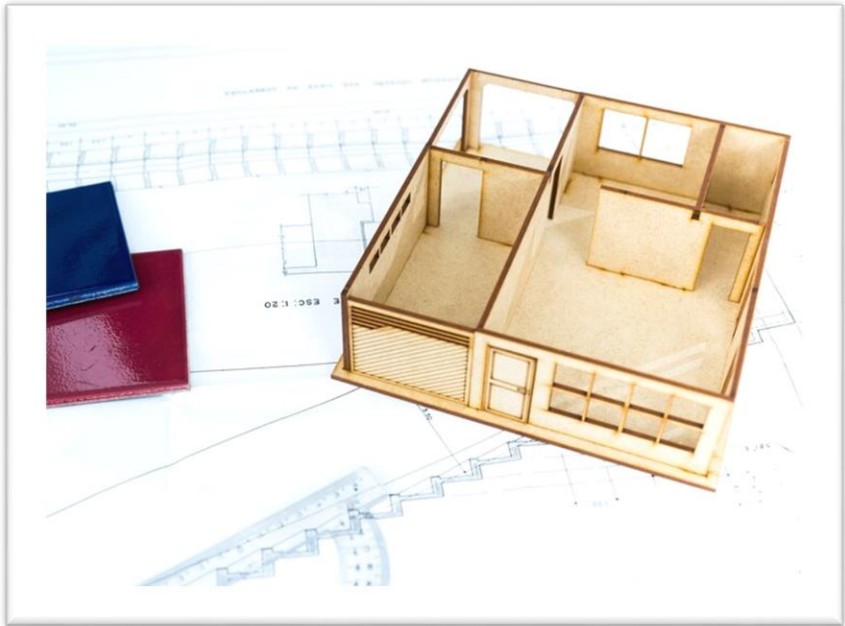
A. PENDAHULUAN

Desa merupakan suatu entitas yang sering dipandang sebagai komunitas terbelakang, yang ditandai dengan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Berawal dari keterbelakangan ini, pemerintah telah menaruh perhatian besar terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Pembangunan desa merupakan gerakan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan yang dilandasi kesadaran untuk meningkatkan kehidupannya yang lebih baik dan kehidupan yang Layak. Secara historis pembangunan desa telah dilaksanakan hingga saat ini dengan berbagai program, pendekatan, dan metode sesuai periode pembangunan, namun hasil yang dicapai belum maksimal. Pembangunan desa belum sepenuhnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk memperoleh pencapaian hasil yang maksimal, maka program pembangunan pedesaan sebaiknya dilakukan dengan berorientasi pada pertumbuhan, khususnya adalah pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan pedesaan, khususnya pertumbuhan ekonomi desa, memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pertama, hampir semua orang Indonesia tinggal di daerah pedesaan. Kedua, meskipun desentralisasi fiskal telah dimulai sejak tahun 2001, data menunjukkan bahwa hampir beberapa masalah mendasar di negara ini, seperti kemiskinan, pendidikan rendah, kesehatan yang buruk, sarana dan prasarana yang tidak memadai, ada di wilayah desa. Oleh karena itu, sesegera mungkin, perlu dibangun reformasi pemahaman bahwa wilayah desa memiliki posisi strategis di Republik Indonesia. Bahkan dapat dikatakan bahwa jika daerah desa maju, maka daerah dan negara akan maju. Dengan demikian, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2013). Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertumbuhan Wilayah. *Cetakan Pertama*, 4.
- Andi Prasetyo, T. (2021). Analisis pengaruh dana desa dan indeks pembangunan manusia per kabupaten/kota terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(4), 375–391. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i4.336>
- Husodo, T. (2020). Pembangunan untuk Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi. *Pustaka UT*, 1(1), 27–28. <https://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/MSLK5103-M1.pdf>
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Laga, Y., & Lobwaer, A. K. R. (2020). Alokasi Dana Desa (ADD), Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, 11(1), 10–21. <https://doi.org/10.35724/jies.v11i1.2746>
- Rimawan, M., & Aryani, F. (2019). Pengaruh alokasi dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia serta kemiskinan di Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(3), 287–295. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/22539>
- Statistik, B. P. (2018). Statistik Tanaman Buah-buahan dan Sayuran Tahunan Indonesia. *Badan Pusat Statistik. Jakarta*.



PEMBANGUNAN PEDESAAN

BAB 9: PROGRAM PEMBERANTASAN KEMISKINAN DAN PENANGGUHAN

Dr. Amruddin, S.Pt., M.Pd., M.Si

Universitas Muhammadiyah Makassar

BAB 9

PROGRAM PEMBERANTASAN KEMISKINAN DAN PENANGGUHAN

A. KEMISKINAN

Badan Pusat Statistik atau BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*) untuk mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Kemiskinan biasanya didefinisikan sebagai sejauh mana suatu individu berada di bawah tingkat standar hidup minimal yang dapat diterima oleh masyarakat dan komunitasnya. Para ahli membuat pengertian atau definisi dari kemiskinan dengan berbagai versi. Kemiskinan dapat berupa gambaran kekurangan dari sisi materi, kurangnya kebutuhan sosial, pendapatan, akses terhadap sumber-sumber tertentu dan lainnya.

Pemerintah dianggap berhasil jika dapat menurunkan angka kemiskinan. Tulisan ini mendeskripsikan tentang kemiskinan dan ruang lingkupnya, dan kemudian mengurai sejumlah program-program pemerintah termasuk permasalahan atau hambatan pelaksanaannya.

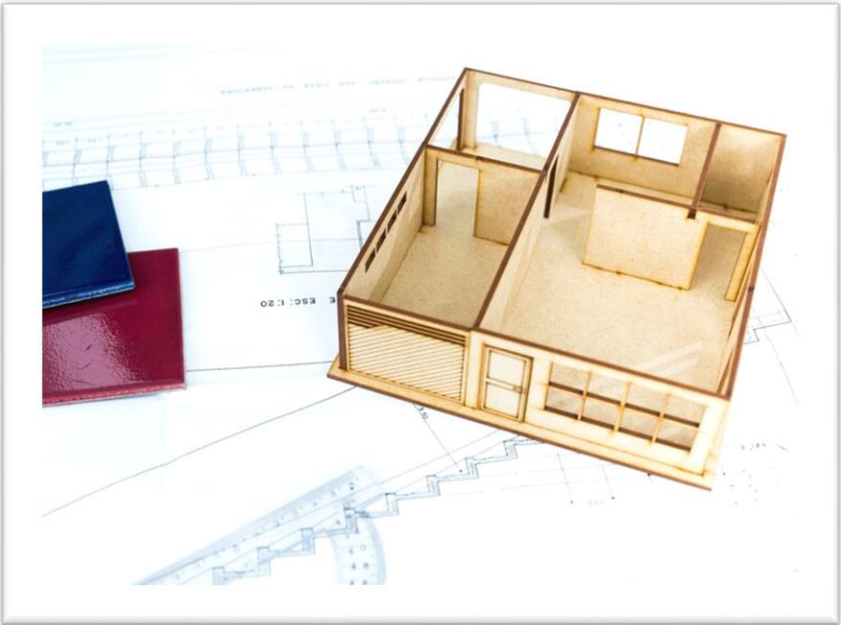
B. RUANG LINGKUP KEMISKINAN

Adapun indikator-indikator kemiskinan sebagaimana dikutip dari Badan Pusat Statistika, antara lain sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan).

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimus. Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu 2. (Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2011), hal.18-39.
- Dimmeram B.G dan Purnasari, P.D. Permasalahan dan Solusi Program Indonesia Pintar dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan di Kabupaten Bengkayang. (Jurnal Sebatik, 2020), V24(2), hal. 307-314.
- Maipita, I. Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan. (Yogyakarta: Penerbit UPP STIM YKPN, 2014), hal.8-9.
- Nia, I.M. Hambatan Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di Puskesmas: *Literature Review*. (Promotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat, 2021), vol.2, no.1, hal.5-6.
- Suryawati, C. Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. (Jurnal MPK, 2005), vol.8, no.3, hal.121-129.
- <https://nasional.tempo.co.> > read> program indonesia pintar. Diakses 19 September 2022.
- <https://www.kemkes.go.id>. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. Diakses 19 September 2022.



PEMBANGUNAN PEDESAAN

BAB 10: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM DAN INFRASTRUKTUR

Muh. Akbar, S.T., M.T

Universitas Musamus

BAB 10

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM DAN INFRASTRUKTUR

A. PENDAHULUAN

Sumber Daya Alam (SDA) meliputi air, sumber air, lahan, udara, dan sumber daya alam lainnya yang apabila dikaitkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia, maka >1,40% per tahun telah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan, perumahan, energi, industri, sanitasi dan penanganan limbahnya (Abduh, 2018; B. Purba et al., 2020). Untuk melakukan pengembangan sumber daya alam yang optimal, diperlukan dukungan pengelolaan yang lebih profesional serta infrastruktur yang handal baik dalam pengelolaan sumber daya alam di kota maupun di desa (Ervianto, 2018; Juwono & Subagiyo, 2018).

Potensi sumber daya alam desa dianggap sebagai modal dasar yang dapat dikelola dan juga dikembangkan demi kepentingan, kelangsungan dan perkembangan desa. Untuk menilai potensi desa, ada beberapa faktor yang bisa dijadikan sebagai pedoman yaitu potensi fisik dan potensi non fisik. Desa telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan negara, hal ini dapat dilihat dari peran desa sebagai ujung tombak yang mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat di bagian akar rumput hingga membuat perencanaan pembangunan yang berkelanjutan (Diartho, 2018; Sidik, 2015). Untuk itulah pemerintah melalui undang-undang mendorong desa agar dapat berkembang dan menjadi desa yang mandiri yang diwujudkan dengan memberikan alokasi dana desa untuk dikelola dengan jumlah mulai dari 800 juta hingga 1,4 miliar per desa (Saputra et al., 2019). Untuk melaksanakan pengelolaan desa, dilakukan dengan dua arah, yaitu perencanaan partisipatif dan perencanaan teknokratik, perencanaan ini dibuat dan dilaksanakan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur dalam peningkatan pengelolaan sumber daya alam (Soleh, 2017).

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, I. M. N. (2018). *Ilmu dan rekayasa lingkungan* (Vol. 1). Sah Media.
- Agustina, S., Saenong, Z., & Tondi, L. (2022). DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT (Studi Kasus Di Desa Atari Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan). *Journal Economics Technology And Entrepreneur*, 1(02 June), 201–211.
- AJAWAILA, L. G., ROMPAS, W., & TULUSAN, F. (2021). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 7(104).
- Akbar, D. S. (2018). Analisis Potensi Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(4), 603–613.
- Akbar, M., Utary, C., Kakerissa, Y., & Asmal, S. (2019). Priorities of road network development to support national food flows in Merauke District with SWOT and AHP methods. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 343(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/343/1/012185>
- Akbar, Muh, Lolo, D. P., & Djaja, I. (2018). Analisis Perubahan Tata Guna Lahan Terhadap Debit Limpasan Drainase Jalan Ahmad Yani–Gang Rawa, Distrik Merauke. *Musamus Journal of Civil Engineering*, 1(1), 11–23.
- Akbar, Muh, & Pamuttu, D. L. (2020). PENINGKATKAN INFRASTRUKTUR JALAN MELALUI PROPOSAL JALAN DESA. *Musamus Devotion Journal*, 2(1), 9–18.
- Akbar, Muh, & Pamuttu, D. L. (2021). Analisis Prioritas Pengembangan Jalan Kampung Jaya Makmur Dalam Mendukung Distrik Kurik Sebagai Daerah. 10(1), 12–16.
- Akbar, Muh, Pamuttu, D. L., Andika, A. P., & Rusdi, M. (2021). PEMODELAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) DENGAN MENGGUNAKAN KOMBINASI TEKNOLOGI TURBIN VERTIKAL AXIS DAN SOLAR CELL. *MUSTEK ANIM HA*, 10(3), 94–99.

- Akbar, Muh, Pamuttu, D. L., Pasalli, D. A., & Hairullah, H. (2021). Analysis Of Satisfaction and Priority Levels of Jaya Makmur Road Development in Supporting Kurik District as A Rice Surplus Area. *E3S Web of Conferences*, 328, 10014.
- Akbar, Muh, Yamin Jinca, M., & Rahim, J. (2018). Combination of the IPA-SWOT-AHP Models For the Formulation of the Road Network of Development Policy (A Case Study in Merauke Regency, Papua Indonesia). *International Journal of Engineering & Technology IJET-IJENS*, 18(03), 183403–185757.
- Ardhyanta, H., Zulfikar, A., Purniawan, A., Rasyida, A., & Widyastuti, W. (2020). Pengaruh Komposisi Nikel (Ni) terhadap Kekerasan dan Struktur Mikro Paduan Baja Tahan Karat Kekuatan Tinggi Fe-C-Mn-Cr-Ni melalui Metode Proses Pengecoran Menggunakan Tungku Pembakaran Gas. *MESIN*, 11(1).
- Arif, I. (2018). *Nikel Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- ARIFIN, M. Y. (2018). *PENGUNAAN PRINSIP IN SITU DAN EX SITU PRESERVATION DALAM UPAYA PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN KEKAYAAN WARISAN BUDAYA BAWAH AIR INDONESIA*. Universitas Airlangga.
- Arini, W., Saputra, V. R., & Ramadani, H. (2021). Pemanfaatan Tumbuhan Lokal Secara Tradisional dalam Peningkatan Ketahanan Pangan oleh Suku Dayak Iban di Desa Mensiau, Kalimantan Barat. *Biotropika: Journal of Tropical Biology*, 9(1), 38–45.
- Badan Pusat Statistik. (2018). Badan pusat statistik. In *BPS-Statistics Indonesia*.
- Diarto, H. C. (2018). Pengembangan wilayah perdesaan berbasis pada potensi sumber daya alam di Kabupaten Bondowoso. *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2).
- Doloksaribu, A., Pamuttu, D. L., & Ribby, S. (2021). Pemanfaatan Long Storage Terhadap Optimalisasi Lahan Irigasi. *Musamus Journal of Civil Engineering*, 3(02), 49–56.
- Effendi, R., Salsabila, H., & Malik, A. (2018). Pemahaman tentang lingkungan berkelanjutan. *Modul*, 18(2), 75–82.

- Ervianto, W. I. (2018). Studi Pendekatan Ekonomi Biru Untuk Infrastruktur Di Indonesia. *Prosiding Semnastek*.
- Fatimah, F., & Kasman, R. (2020). MENINGKATKAN MUTU MASYARAKAT MELALUI BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN STABILITAS EKONOMI DAN SOSIAL. *Abdi Dosen: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 4(4), 405–411.
- Firmansyah, J. (2018). Eksplanasi Ilmiah Air Mendidih Dalam Suhu Ruang. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 1(2), 75–79.
- Hidayat, H. (2011). Pengelolaan sumber daya alam berbasis kelembagaan lokal. *J. Sej. CITRA LEKHA*, 15(1), 19–32.
- Irzon, R. (2021). Penambangan timah di Indonesia: Sejarah, masa kini, dan prospeksi. *Jurnal Teknologi Mineral Dan Batubara*, 17(3), 179–189.
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Juwono, P. T., & Subagiyo, A. (2018). *Sumber Daya Air dan Pengembangan Wilayah: Infrastruktur Keairan Mendukung Pengembangan Wisata, Energi, dan Ketahanan Pangan*. Universitas Brawijaya Press.
- KHAIRURROSIKIN, K. (2020). *STRATEGI BADAN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD) DALAM MENGAWASI ALOKASI DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA MOYO KECAMATAN MOYO HILIR KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018*. Universitas_Muhammadiyah_Mataram.
- Kusuma, M. E., & Muta'ali, L. (2019). Hubungan Pembangunan Infrastruktur dan Perkembangan Ekonomi Wilayah Indonesia. *Jurnal Bumi Indonesia*, 8(3).
- Maddinsyah, A., Kustini, E., & Syakhril, S. (2018). Penyuluhan Manajemen Pemanfaatan Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Perekonomian Keluarga Kampung Ciboleger Lebak-Banten. *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana*, 1(1), 71–80.
- Mahadiansar, M., Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S., & Aspariyana, A. (2020). Paradigma pengembangan model pembangunan nasional Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 17(1), 77–92.
- Manik, K. E. S. (2018). *Pengelolaan lingkungan hidup*. Kencana.

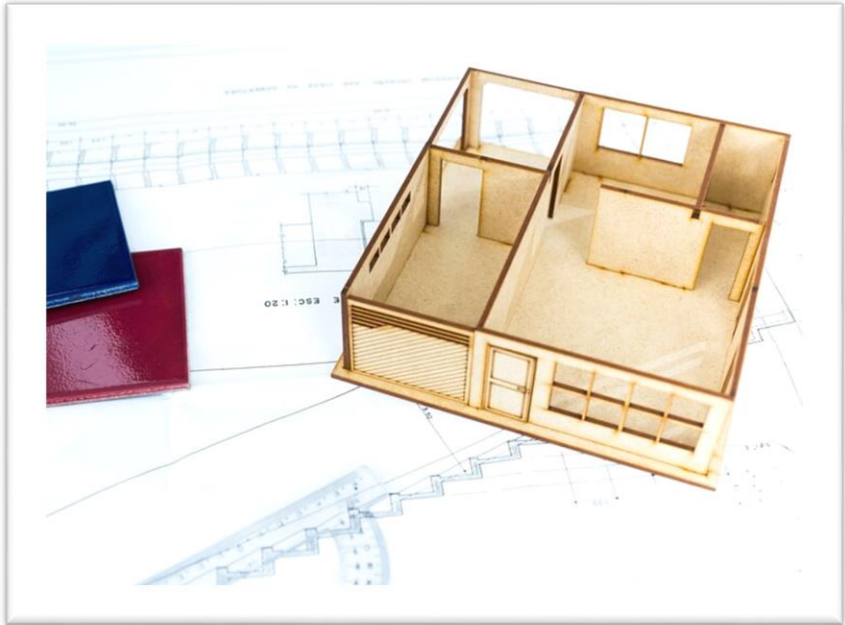
- Maspaitella, M. J., & Rahakbauwi, N. (2014). Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendekatan Pekerja Sosial. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 5(2), 157–164.
- Musarofah, S. (2021). Ketersediaan Air Bagi Kehidupan: Studi Terhadap Asal-Usul dan Hilangnya Air di Bumi Perspektif Al-Quran dan Sains. *Ngabari: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 14(1), 61–76.
- Nasution, M. (2022). Bahan Bakar Merupakan Sumber Energi Yang Sangat Diperlukan Dalam Kehidupan Sehari Hari. *JET (Journal of Electrical Technology)*, 7(1), 29–33.
- Nathanael, G. K. (2021). Industri Batubara Dari Sisi Ekonomi, Politik, dan Lingkungan. *Parapolitika: Journal of Politics and Democracy Studies*, 2(1).
- Nurismawati, N., Romdanih, R., & Rahmad, I. N. (2020). Hubungan Kreativitas Menggambar dengan Pemahaman Pembelajaran IPA Materi Sumber Daya Alam. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan STKIP Kusuma Negara III*, 31–37.
- Prayitno, U. S., & dan Informasi, P. P. P. D. (2013). *Pemberdayaan masyarakat*. P3DI Setjen DPR, Republik Indonesia dan Azza Grafika.
- Purba, B., Nainggolan, L. E., Siregar, R. T., Chaerul, M., Simarmata, M. M. T., Bachtiar, E., Rahmadana, M. F., Marzuki, I., & Meganingratna, A. (2020). *Ekonomi Sumber Daya Alam: Sebuah Konsep, Fakta dan Gagasan*. Yayasan Kita Menulis.
- Purba, D. W., Thohiron, M., Surjaningsih, D. R., Sagala, D., Ramdhini, R. N., Gandasari, D., Wati, C., Purba, T., Herawati, J., & Sa'ida, I. A. (2020). *Pengantar ilmu pertanian*. Yayasan Kita Menulis.
- Ramadana, M., & Leping, P. (2018). Identifikasi Zona Mineral Bijih Besi Berdasarkan Pemodelan Inversi 3d Menggunakan Metode Magnetik. *GEOSAINS KUTAI BASIN*, 1(2).
- Rohma, M. (2021). Pembangunan Desa Lewat Pemeliharaan Infrastruktur Dukung Pembangunan Desa Lebih Inklusif. *Jurnal Sosial Politik Integratif*, 1(1), 83–93.
- Rouw, A. (n.d.). *TINJAUAN FILOSOFIS MASALAH PETANI DAN MASALAH RISET DALAM PARADIGMA PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SPESIFIK LOKASI*.

- Safitri, B. R. A. (2019). Analisis kandungan mineral logam mangan (Mn) di kawasan pertambangan desa bangkang. *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram*, 6(1), 9–15.
- Safitri, B. R. A., & Pratama, L. (2018). ANALISIS KANDUNGAN MINERAL TEMBAGA (Cu) YANG TERDAPAT PADA STRUKTUR BATU TAMBANG DENGAN METODE ATOMIC ABSORPTION SPECTROFOTOMETER (AAS). *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram*, 5(2), 105–108.
- Saputra, K. A. K., Pradnyanitasari, P. D., Piliandani, N. M. I., & Putra, I. G. B. N. P. (2019). Praktek akuntabilitas dan kompetensi sumber daya manusia untuk pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 168–176.
- Sidik, F. (2015). Menggali potensi lokal mewujudkan kemandirian desa. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(2), 115–131.
- Simatupang, W. (2018). Potensi pengembangan produk olahan pertanian untuk mendukung perkembangan pariwisata. *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan*, 2(2), 566–579.
- Sitorus, H. (2018). *Membangun Maritim dan Perikanan*.
- Soleh, A. (2017). Strategi pengembangan potensi desa. *Jurnal Sungkai*, 5(1), 32–52.
- The World Bank. (1994). The World Bank Annual Report 1994. *The World Bank*, 1.
<http://documents.worldbank.org/curated/en/567941468322429653/The-World-Bank-annual-report-1994>
- Tumangkeng, S. (2018). Analisis potensi ekonomi di sektor dan sub sektor pertanian, kehutanan dan perikanan kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(01).
- Vitriyana, I., & Budiono, I. (2018). Manajemen Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 2(3), 374–385.
- Widjaja, S. (2019). *Sumber Daya Non Hayati Maritim*.
- Wiryono, W., & Lipranto, L. (2019). Keanekaragaman jenis tumbuhan yang berguna secara lokal di Desa Batu Ampar, di dekat kawasan Hutan Lindung Bukit Raja Mandara, Kabupaten Bengkulu Selatan (The diversity of locally useful plants in Batu Ampar Village near Bukit

Raja Mandara Protected). *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, 20(2), 119–128.

Yustisia, T. V. (2015). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*. Visimedia.

Zakiyah, U., & Idrus, I. A. (2017). Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa Ponggok. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 2(2), 84–95.



PEMBANGUNAN PEDESAAN

BAB 11: PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEDESAAN

Dr. Ir. James Sinurat, MURP

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Bangsa, Bogor

BAB 11

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEDESAAN

A. PENDAHULUAN

Penataan ruang adalah sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang harus direncanakan sedemikian rupa agar tercipta keseimbangan antara pembangunan fisik dengan kelestarian lingkungan (*environmental sustainability*).

Kawasan pedesaan adalah kawasan yang kegiatan utama di dalamnya adalah sektor pertanian, termasuk sumber daya alam, tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Wilayah perdesaan mendominasi luas Indonesia dibandingkan dengan wilayah perkotaan.

Perencanaan adalah langkah awal dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Perencanaan memiliki tujuan yang akan dicapai pada waktu yang akan datang. Perencanaan merupakan kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam perencanaan terdapat aktivitas pengujian arah pencapaian, mengkaji ketidakpastian, mengukur kapasitas, menentukan arah pencapaian, serta menentukan langkah untuk mencapainya.

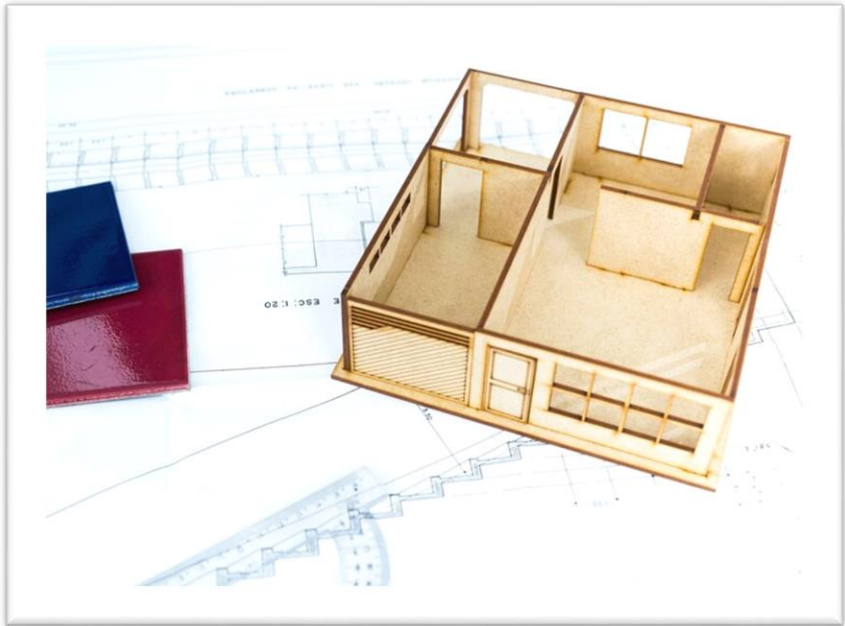
Perencanaan wilayah perdesaan diperlukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan wilayah perdesaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kehidupan perdesaan yang aman dan menyenangkan.

Pembangunan adalah kegiatan atau usaha sadar, terencana dan berkelanjutan untuk mengubah kondisi masyarakat menuju kondisi yang lebih baik. Pembangunan menyangkut semua aspek kehidupan fisik, non fisik, material spiritual dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariadi, A. 2019. Perencanaan Pembangunan Desa. *Meraja Journal* Vol. 2 No. 2 Juni 2019. <https://media.neliti.com>.
- Brundtland, Gro. 4. 1987. Kata Pengantar dari Ketua Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (The World Commission on Environment and Development. *Hari Depan Kita Bersama*. Penerbit PT. Kompas Gramedia. Jakarta.
- Budiharsono, S. 2018. *Membangun Keajaiban Wilayah Perdesaan*. Penerbit IPB Press, Anggota IKAPI, ISBN: 978-602-440-282-2.
- Budiharsono, S. 2021. *Desa Zaman Now*. Penerbit IPB Press, Anggota IKAPI. ISBN: 978-623-256-527-2.
- Ruchyat D. Djakapermana. 2021. Tiga Prinsip Dasar Penataan Ruang. Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. <https://tataruang.atrbpn.go.id>
- Lawn, Philip A. 2001. *Toward Sustainable Development: An Ecological Economics Approach*. International Society for Ecological Economics, Lewis Publishers. Washington, D.C.
- Paisal, M. 2021. Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Permukiman dalam Mendukung Perkembangan Kota Tarakan. <http://repository.uin-alauddin.ac.id>.
- Rohiani, A. 2021. Perencanaan Penataan Ruang Desa Berbasis Potensi Desa sebagai Kendali Pembangunan Desa yang Terarah dan Berkelanjutan. *Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan*. Februari 2021. ISSN 2549-3922 EISSN 2549-3930
- Rustiadi, E., Sunsun Saefulhakim, dan Dyah R. Panuju. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Crestpent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Anggota IKAPI. ISBN: 978-979-461-687-1.
- Soegijoko, S, 1997, "Ruang Lingkup dan Peranan Regional Planning," Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia, Penyunting: Budhy Tjahjati S. Soegijoko dan BS. Kusbianoro, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia), p. 17.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.



PEMBANGUNAN PEDESAAN

BAB 12: LEMBAGA YANG BERWENANG UNTUK PEMBANGUNAN PEDESAAN

Dasep Dodi Hidayah, S.Sos., M.Si

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT Priatim Tasikmalaya

BAB 12

LEMBAGA YANG BERWENANG UNTUK PEMBANGUNAN PEDESAAN

A. PENDAHULUAN

Pembangunan perdesaan merupakan tahap dari alur utama proses pemerintahan desa yang umumnya diawali dari kepemimpinan desa beserta sumber daya yang melingkupinya sebagai input, dilanjut oleh pembangunan desa itu sendiri sebagai sebuah proses, dan terakhir ialah kesejahteraan masyarakat desa sebagai output atau luaran dari proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Artinya, sudah barang tentu bahwa pembangunan desa merupakan motor penggerak yang menentukan ke mana arah desa, atau dalam bahasa lain, pembangunan desa (entah baik atau buruk) juga menjadi indikator seberapa serius Pemerintah desa mendorong masyarakat menuju kesejahteraan. (Adiwilaga Rendi, Alfian Yeni, 2021). Merujuk kepada konsep tersebut bahwa memang sudah jelas bahwa pembangunan perdesaan merupakan langkah awal dalam pelaksanaan pembangunan nasional, mengingat bahwa perdesaan memiliki wilayah yang sangat dominan di Indonesia ini. Dalam konteks Indonesia, kata pembangunan sudah menjadi kata kunci dalam segala hal, secara umum kata ini diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya, seringkali kemajuan yang dimaksud terutama adalah kemajuan berupa material atau yang terwujud (tangible). Maka pembangunan sering diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh masyarakat di bidang ekonomi. (Budiman, 1996)

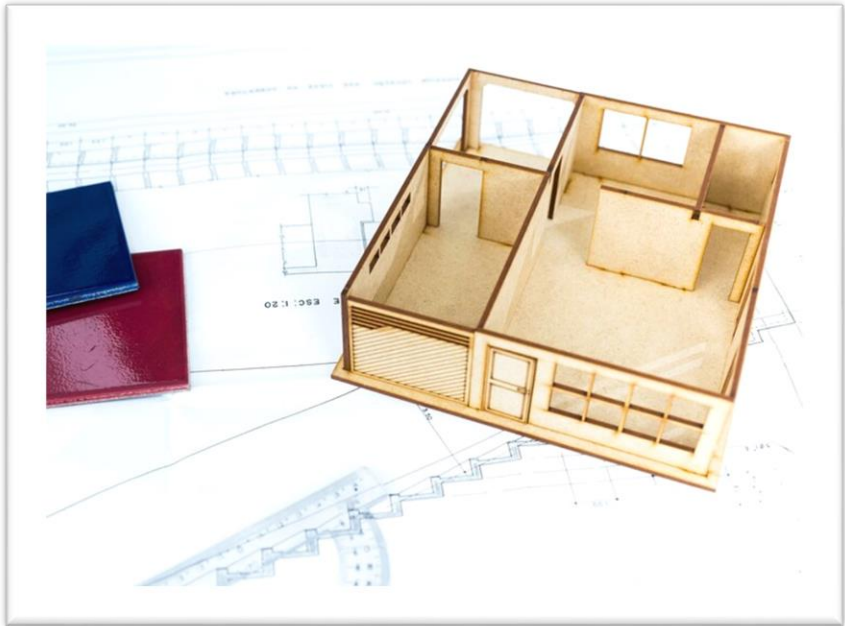
Pembangunan perdesaan juga merupakan sebagai bagian integral dari pembangunan daerah dan nasional, dewasa ini mendapat sorotan yang amat tajam dari berbagai kalangan. Persoalan ini selain menyangkut sebagian besar (51.2%) masyarakat Indonesia berdiam di desa (BPS, 2010), karena banyak persoalan-persoalan pembangunan yang belum mampu

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan pedesaan dan perkotaan*. Graha Ilmu.
- Adiwilaga Rendi, Alfian Yeni, R. U. (2021). *Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia* (R. Adiwilaga (ed.); I). Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Budiman, A. (1996). *Teori pembangunan dunia ketiga*.
- Chamber, R. (1999). *Pembangunan desa*. LP3ES.
- Dove, M. R. (1985). *Peranan kebudayaan tradisional Indonesia dalam modernisasi*.
- Entang, M. (2021). *Lembaga Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Dinamika Pembangunan* (Z. Wahyu (ed.); Pertama). Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Fatmawati, N. I. (2018). Desentralisasi Asimetris, Alternatif Bagi Masa Depan Pembagian Kewenangan di Indonesia. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 10(3), 73–85.
- Hutagalung, S., Utoyo, B., Sulistio, E. B., & Puspawati, A. A. (2013). *Optimalisasi Pembangunan Desa Pelatihan Perencanaan Pembangunan Desa Bagi Sekretaris Desa*.
- Jamal, E. (2009). Membangun momentum baru pembangunan pedesaan di Indonesia. *Jurnal Litbang Pertanian*, 28(1), 7–14.
- Marzali, A. (2015). *Antropologi & Kebijakan Publik*. Prenada Media.
- Pahmi, S. Y. (2010). *Perspektif baru antropologi pedesaan*. GP Press.
- Tjiptoherijanto, P. (1997). Pengentasan kemiskinan melalui pembangunan jaringan ekonomi pedesaan (sebagai suatu strategi). *Populasi*, 8(2).
- Tjokrowinoto, M. (1987). *Politik pembangunan: Sebuah analisis konsep, arah, dan strategi*. Tiara Wacana Yogya.
- Winarno, B. (2003). *Komparasi organisasi pedesaan dalam pembangunan: Indonesia vis-à-vis Taiwan, Thailand dan Filipina*. Media Pressindo.

Peraturan lainnya

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
peraturan menteri dalam Negeri No.114 Tahun 2014, tentang pedoman
Pembangunan Desa
Keputusan presiden republik indonesia Nomor 81 tahun 1971 Tentang
Lembaga sosial desa



PEMBANGUNAN PEDESAAN

BAB 13: PEMBIAYAAN

PEMBANGUNAN PEDESAAN

Dewi Sriastuti Nababan, S.T., M.T

Universitas Musamus

BAB 13

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PEDESAAN

A. PENDAHULUAN

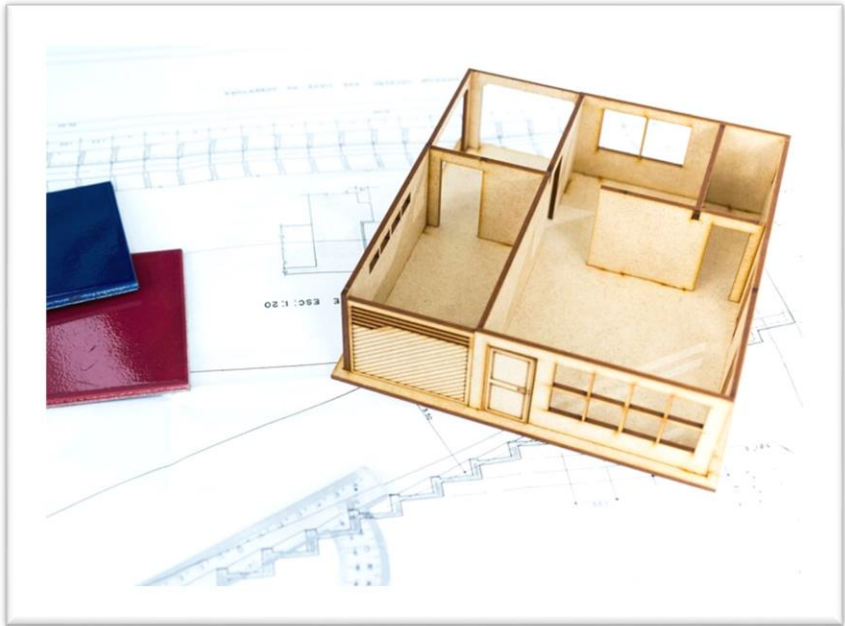
Pembiayaan pembangunan pedesaan merupakan usaha pemerintah maupun di luar pemerintah menyediakan dana untuk membiayai pembangunan di desa yang bersumber dari *revenue*, *debt*, dan *equity* (Pembangunan, 2015). Dana yang diberikan oleh pemerintah untuk pembangunan suatu desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diteruskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten maupun Kota. Penggunaan dana yang diberikan oleh pemerintah dijalankan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembinaan masyarakat dan pemberdayaan sumber daya manusia/masyarakat desa setempat. Dana desa yang berasal dari pemerintah dialokasikan sesuai luas wilayah, jumlah penduduk, geografis desa serta tingkat kemiskinan warga desa (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 2014). Diberikannya dana bagi perkembangan desa merupakan komitmen negara untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan desa, mendorong pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan kepada warga desa, memotivasi keswadayaan dan gotong royong diantara warga desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan warga dan pendapatan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (Indonesia, 2014).

Penggunaan dana desa dalam pelaksanaan program-program desa sebaiknya dilakukan dalam bentuk swakelola. Melalui swakelola, kegiatan pengadaan barang/jasa bagi program-program pembangunan desa direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Lembaga/satuan perangkat daerah maupun organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat setempat. Demikian pula cara memperolehnya, perangkat

DAFTAR PUSTAKA

- Baru, B. K. (2017). *Peraturan Daerah Kabupaten Kota Baru*. 18(September).
- Dewi Sriastuti Nababan, M. A. (2022). *Desain Perkerasan Jalan*. UNY Press.
- Hamimuliono, M. basuki. (2016). Panduan Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan. *Panduan Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan*, 47.
- Indonesia, P. P. R. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, 15 Januari*. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa* (p. 92).
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2016). Peraturan menteri keuangan RI Nomor.49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan. Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. *Peraturan Menteri Keuangan RI*, 1–47.
- Pembangunan, B. P. K. dan. (2015). *Laporan Hasil Penelitian Profil Pembiayaan Pembangunan*. [https://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/2587/15.110-Profil-Pembiayaan-Pembangunan#:~:text=Pengertian Pembiayaan Pembangunan dalam arti luas%2C yaitu%3A,bersifat konvensional atau non-konvensional](https://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/2587/15.110-Profil-Pembiayaan-Pembangunan#:~:text=Pengertian%20Pembiayaan%20Pembangunan%20dalam%20arti%20luas%20yaitu%3A,bersifat%20konvensional%20atau%20non-konvensional.).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114. (2014). *Pedoman Pembangunan Desa*. 1–34.
- Peraturan Menteri Desa, P. D. T. dan T. R. I. (2020). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia*, 19(555), 1–53.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. 2, 1–25.

Septiansyah, B., & Setiawan, A. (2021). Pelaksanaan Pembangunan di Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung. *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*, 5(1), 24–37. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/365>



PEMBANGUNAN PEDESAAN

BAB 14: IMPLEMENTASI, MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN PEDESAAN

Dr. Zainal Abidin, S.P., M.Si

Universitas Ichsan Gorontalo

BAB 14

IMPLEMENTASI, MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN PEDESAAN

A. PEMBANGUNAN PEDESAAN

Pembangunan pedesaan adalah pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman.

Pembangunan yang berbasis pedesaan diberlakukan untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan perkembangan antar wilayah, sebagai solusi bagi perubahan sosial, desa sebagai basis perubahan. Dalam realisasinya, pembangunan pedesaan memungkinkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi digerakkan ke pedesaan sehingga desa menjadi tempat yang menarik sebagai tempat tinggal dan mencari penghidupan. Infrastruktur desa, seperti irigasi, sarana dan prasarana transportasi, listrik, telepon, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana- sarana lain yang dibutuhkan, harus bisa disediakan sehingga memungkinkan desa maju dan berkembang.

Skala prioritas pembangunan pedesaan yang berbasis pada pengembangan pedesaan (*rural based development*), meliputi:

1. pengembangan ekonomi lokal;
2. pemberdayaan masyarakat;
3. pembangunan prasarana dan sarana; dan
4. pengembangan kelembagaan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Helmy Faishal Zaini. "*Pembangunan Pedesaan*". Diakses tanggal 14 Mei 2014.
- Adisasmita, Rahardjo (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Daldjoeni, N dan A. Suyitno (2004). *Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan*. Bandung: PT. Alumni.
- Didi Rosadi (2011). *Monitoring dan Evaluasi*. Diakses 24 Juli 2022
<https://setkab.go.id/pemanfaatan-dana-desa-tahun-2021-dan-prioritas-pemanfaatan-dana-desa-tahun-2022/>
- Hulme, David & M. Turner (1990). *Sociology of Development: Theories, Policies and Practices*. Hertfordshire: Harvester Whearsheaf.
- Korten, David C. (1984). *Pembangunan yang Memihak Rakyat*. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan
- Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014, pasal 1 angka 8 bahwa pengertian Dana Desa atau disingkat (DD) adalah : Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014, pasal 1 angka 9 yang berbunyi sebagai berikut: Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

PROFIL PENULIS

Dr. Feliks Arfid Guampe, S.E., M.Si



Penulis adalah putra daerah Sulawesi Tengah yang lahir pada 08 Januari 1990. Menyelesaikan pendidikan S1 di bidang Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, tahun 2012. Pada tahun 2013 memperoleh gelar Magister Sains Studi Pembangunan di Program Pascasarjana pada kampus yang sama.

Penulis berkat beasiswa dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui program beasiswa BUDI-DN LPDP dapat Meraih gelar Doktor Pendidikan Ekonomi di Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, tahun 2021. Penulis merupakan Dosen tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Tentena (UNKRIT) di kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 2015 sampai sekarang. Penulis memiliki kepakaran di bidang ekonomi pembangunan, pembangunan perdesaan dan ekonomi pertanian. Oleh karena itu penulis aktif dalam melakukan berbagai penelitian serta publikasi jurnal nasional maupun internasional serta menulis buku terkait dengan bidang kepakaran tersebut. Buku yang ditulis dan telah dipublikasikan adalah buku berjudul *Dinamika Usaha Tani perkebunan*, buku berjudul *Literasi dan Perilaku Sosial Ekonomi Petani Perdesaan* serta beberapa book chapter.

Umar, S.E., M.SE



Penulis kelahiran April 1994. Lulusan S-2 Magister Ilmu Ekonomi di Universitas Airlangga Surabaya. Fokus mengajar di IAIN Palopo, Sulawesi Selatan. Penulis tertarik dengan dunia akademik sejak tahun 2013. Selain dunia akademik, penulis juga tertarik dengan penelitian dan pengabdian masyarakat. Fokus penelitian penulis di bidang Ekonomi Perencanaan Pembangunan.

Terdapat beberapa jurnal penelitian yang telah dipublikasi, seperti “Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga dan Masalah Stunting Balita di Indonesia” (2019), “*Leading Sectors and Economic Structure of Luwu Timur District*” (2022), “*Comparative Study of Zakat Funds Collection Through Manual Fundraising and Digital Fundraising in Indonesia*” (2022)

dan *“Economic Sector Growth and Distribution in Jeneponto District”*. Selain itu, penulis aktif menjadi pemateri pada kegiatan-kegiatan seminar nasional. Penulis dapat diajak berkolaborasi dalam penelitian maupun penulisan buka melalui surel: umar@iainpalopo.ac.id

Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si



Penulis lahir di Salati, 19 September 1985. Penulis adalah alumni sekaligus Dosen pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk. Dengan beberapa kawan sebelumnya penulis telah berhasil menerbitkan buku antologi puisi pertamanya *“Air Mata Anonim”*. Penulis juga berkesempatan melibatkan diri dalam penulisan Book Chapter *“Pengantar Ilmu Administrasi Publik (Good Governance), Marketing Politik (Marketing Politik dan Demokrasi),* serta tulisan lainnya, dan ada pula yang sedang dalam proses penerbitan.

Muhammad Nur, S.E., M.Si



Penulis lulus S1 Universitas Muhammadiyah Parepare 2012 program studi Ilmu Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Lulus S2 ilmu ekonomi di Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia 2015. Saat ini mengabdikan sebagai tenaga pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare mulai 2019. Pengalaman sebagai tenaga pengajar masih terus diasi. Menjalankan tridarma perguruan tinggi menjadi tanggung jawab wajib dipenuhi salah satunya menulis buku ini. Pengalaman menulis, buku yang berhasil ditulis sebagai penulis kedua buku *“Perekonomian Indonesia”*. Saat ini dipercaya mengampuh mata kuliah perekonomian Indonesia dan Ekonomi Perkotaan dan Pedesaan.

Dr. Ardhana Januar Mahardhani, MKP



Penulis lahir di Tulungagung pada tanggal 23 Januari 1987. Merupakan dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Ponorogo pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Menempuh pendidikan formal S1 Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang, S2 Magister Kebijakan Publik Universitas Airlangga Surabaya, dan S3 Administrasi Publik di Universitas Diponegoro Semarang. Penulis juga merupakan sekretaris Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (AP3Knl) Provinsi Jawa Timur.

Saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan dalam proses kesempurnaan tulisan dari penulis. Pembaca dapat menghubungi penulis melalui email: ardhana@umpo.ac.id

Ir. Fachrul Husain Habibie, M.M



Penulis lahir di Ujungpandang pada tanggal 22 Juni 1968. Pendidikan yang telah ditempuh penulis adalah Sarjana Elektro (Telekomunikasi dan Elektronika) lulus pada tahun 1992 dari Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Ujungpandang, S2 Magister Manajemen lulus pada tahun 2009 dari Program Pasca Sarjana Universitas Trisakti, Jakarta.

Saat ini sedang mengikuti pendidikan Doktorat Pariwisata. Penulis juga sebagai dosen STP Trisakti, pengampu matakuliah Studi Kelayakan Bisnis dan Kewirausahaan, Horeka. Selain menjadi Dosen juga bertanggung jawab sebagai Kepala Satuan Pengawasan Interna pada tahun 2010 sd 2014, Direktur Vokasi pada tahun 2014 sd 2018 dan saat ini sebagai Kepala Pusat Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Berpengalaman selama 12 tahun di berbagai Industri. Penulis juga menulis buku Standarisasi, Buku Sistem Informasi Perhotelan, Buku Pengabdian Masyarakat dengan judul Strategi Bertahan UMKM dalam Masa Pandemi Covid 19 dan Pengembangan Wira Usaha Baru dalam Rangka Meningkatkan Produktifitas Di Masa Pandemi Covid 19. Buku Pengembangan Desa Menjadi Desa Wisata yang Berdaya Saing dan

Berkelanjutan. Buku Perilaku Organisasi (Tim dan Tim Kerja). Selain itu penulis juga pernah aktif sebagai coordinator Pembuatan Grand Desain Desain Pengembangan Ekowisata Kawasan Sungsang Kabupaten Banyuasi 2020 – 2045, dan Kordinator Lapangan Pemberdayaan Masyarakat untuk Mendukung Pengembangan Agrowisata Kecamatan Bunga Raya (focus Kuliner).

Andi Hartati, S.Sos, M.A



Penulis lahir di Bantaeng, 8 April 1985. Lulus S1 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Palu pada Tahun 2006. Lulus S2 pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada Tahun 2009. Saat ini merupakan dosen tetap Universitas Tompotika Luwuk

Banggai. Menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan pada periode 2011-2015, sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan pada periode 2015-2019 dan menjabat sebagai Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan periode 2019-2023. Buku yang sudah diterbitkan antara lain Buku Metodologi Penelitian Sosial, Desa dan Bumdes, dan Pengantar Ilmu Komunikasi. Beberapa hasil penelitian kerja sama antara pemerintah daerah antara lain; Indeks Pembangunan Gender, Reformasi Birokrasi dan Penyusunan Naskah Akademis Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Banggai.

Dina Limbong Pamuttu, S.T., M.T



Penulis lahir di Asmat, 12 Juni 1985. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Jurusan Teknik Sipil di Universitas Musamus dan lulus pada tahun 2012. Tahun 2013, penulis tugas belajar di Institut Teknologi Sepuluh Nopember dalam Program Magister Teknik Sipil. Sejak tahun 2012 sampai sekarang, bekerja sebagai dosen di Jurusan Teknik

Sipil, Universitas Musamus. Dalam aktivitas sebagai tenaga pengajar, penulis aktif dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi yaitu

melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian baik secara mandiri maupun dalam hibah nasional. Selain melaksanakan penelitian dan pengabdian, Penulis juga kerap membuat tulisan dalam bentuk artikel dan buku sebagai upaya untuk peningkatan ilmu pengetahuan.

Dr. Amruddin, S.Pt., M.Pd., M.Si



Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Peternakan dan Perikanan Unhas (1996) selanjutnya S2 di PPs UNM (2001) dan PPs UIM (2014) Program Studi Agribisnis, serta menyelesaikan S3 di Program Sosiologi UNM (April-2021). Aktif berorganisasi pada Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI), Asosiasi Agribisnis Indonesia (AAI), serta PERHEPI Komisariat Makassar. Penulis diamanahkan menjadi ketua prodi Agribisnis periode 2014-2018 di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar. Lahir dan besar di Kota Makassar. Menikah dengan Syahrini (48) dikaruniai anak, Muh. Fatih (19), Sabil Khairat (16) dan Sarah Nabilah (14). Penulis senang dan aktif menulis, buku pertama yang dipublikasi adalah Kota Tanpa Maksiat diterbitkan Pustaka Refleksi Makassar (2003), Mengapa Memilih Pemimpin Islam (Pustaka Timur Yogyakarta, 2007), Pokok-Pokok Sosiologi pertanian dan Pokok-Pokok Metodologi Penelitian (2010), Kelembagaan, Organisasi dan Kepemimpinan (Lembaga Penerbitan Unismuh, 2011), selanjutnya beberapa buku kolaborasi diantaranya, adalah Dinamika Pembangunan Pedesaan dan Pertanian, Membangun Pertanian: Menguntungkan dan Berkelanjutan (2022). Sehari-hari sebagai dosen pada matakuliah, Sosiologi Pertanian, Manajemen Agribisnis, Agribisnis Peternakan, serta Ekonomi Sumber Daya Lingkungan. Korespondensi: Jl. Toddopuli Raya No.37 Makassar Hp. 08124214415

Muh. Akbar, S.T., M.T



Penulis lahir di Merauke, 12 April 1991. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Jurusan Teknik Sipil di Universitas Musamus dan lulus pada tahun 2013. Tahun 2015, penulis tugas belajar di Universitas Hasanuddin dalam Program Magister Teknik Transportasi. Sejak tahun 2016 sampai sekarang, bekerja sebagai dosen di Jurusan Teknik Sipil, Universitas Musamus. Dalam aktivitas sebagai tenaga pengajar, penulis aktif dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi yaitu melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian baik secara mandiri maupun dalam hibah nasional. Selain melaksanakan diseminasi teknologi tepat guna dalam wujud pengabdian, penulis juga kerap membuat tulisan dalam bentuk artikel dan buku sebagai upaya untuk peningkatan ilmu pengetahuan.

Dr. Ir. James Sinurat, MURP



Penulis adalah dosen Program Magister Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Bangsa, Bogor. Pendidikan Strata 1 diselesaikan pada Institut Pertanian Bogor (IPB), tahun 1978. Pendidikan Strata 2 diselesaikan pada Virginia Commonwealth University (VCU), Amerika Serikat, atas biaya *World Bank*, dengan gelar Master of Urban and Regional Planning (MURP), tahun 1995. Pendidikan Strata 3 diselesaikan pada Program Studi Manajemen Lingkungan, Universitas Negeri Jakarta (UNJ), tahun 2015 atas biaya sendiri. Penulis dengan Scopus ID: 5719 3741 552 telah menulis enam buku kolaborasi pada tahun 2022. Pertama, buku “Paradigma Agribisnis”, terbit Januari 2022; Kedua, buku “CSR Perusahaan: Teori dan Praktis untuk Manajemen yang Bertanggung Jawab”, terbit Februari 2022; Ketiga, buku “Manajemen Pariwisata”, terbit Maret 2022. Ketiga buku pertama diterbitkan oleh Widina Bakti Persada Bandung, anggota IKAPI. Ketiga buku dimaksud memiliki ISBN dan terindeks Google Scholar dan Google Books. Buku keempat adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), terbit Mei 2022. Buku kelima

adalah Kesehatan Lingkungan Pemukiman dan Perkotaan, terbit Juni 2022. Buku keenam adalah Pemberdayaan Masyarakat, terbit Juni 2022. Ketiga buku terakhir diterbitkan oleh PT. Global Eksekutif Teknologi, Padang, Sumatera Barat, anggota IKAPI. Ketiga buku terakhir memiliki ISBN dan terindeks Google Scholar.

Dasep Dodi Hidayah, S.Sos., M.Si



Penulis lahir di Tasikmalaya 29 September 1989. Menamatkan SDN Cisodong Pameutingan Cipatujah tahun 2002, MTsN Sukamanah tahun 2005, MAN Sukamanah tahun 2008, S1 Ilmu Administrasi Negara di STIA YPPT Priatim Tasikmalaya tahun 2012, S2 masih di kampus yang sama STIA YPPT Priatim Tasikmalaya bidang Ilmu Administrasi Negara lulus tahun 2015 dan di tahun sekarang 2022 mulai masuk sebagai mahasiswa S3 pada Bidang Ilmu Sosial di Universitas Pasundan Bandung. Sekarang penulis merupakan Dosen Tetap di STIA YPPT Priatim Tasikmalaya pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Mengampu mata kuliah Sistem Pemerintahan Daerah, Birokrasi dan Governansi Publik, dan Manajemen Risiko. Penulis aktif juga menulis artikel di beberapa jurnal ilmiah. Email penulis: dasephidayah89@gmail.com

Dewi Sriastuti Nababan, S.T., M.T



Penulis lahir di Merauke, 19 Februari 1986. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Jurusan Teknik Sipil di Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan lulus pada tahun 2008. Tahun 2012, penulis tugas belajar di Universitas Hasanuddin dalam Program Magister Sistem Transportasi. Sejak tahun 2008 sampai sekarang, bekerja sebagai dosen di Jurusan Teknik Sipil Universitas Musamus. Dalam aktivitas sebagai tenaga pengajar, penulis aktif dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi berupa pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik secara mandiri maupun dalam hibah. Penulis juga kerap membuat tulisan dalam

bentuk artikel dan buku sebagai bentuk upaya peningkatan ilmu pengetahuan.

Dr. Zainal Abidin, S.P., M.Si



Penulis lahir di Bone Sulawesi Selatan tanggal 19 November 1964. Saat ini merupakan Dosen Universitas Ichsan Gorontalo bidang Ilmu Pertanian konsentrasi Agribisnis Pertanian. Pendidikan formal Diploma 3 Ilmu Sosial, S1 Ilmu Sosial Unismuh Makassar, S1 Agribisnis Pertanian Univ. 45 Makassar, S1 Unhas sebagai bagian dari S3 Unhas, Magister Sains Agribisnis Unhas Makassar 2003 dan Pendidikan Doktor(S3) Ilmu-Ilmu Pertanian Unhas 2016. Telah mengikuti pelatihan pengembangan karier *Cosultant SMEs Nam Centre* Jakarta kerja sama RI dan Jepang 2001, Kewirausahaan Departemen Perindustrian 1997, Pekerti, AA 2010 dan Metodologi Penelitian, 2010 menjadi pengurus BDS Indonesia, Pembina Peragi Cabang Gorontalo, Perhimpni, Asosiasi Dosen Indonesia, Anggota Perhepi Cabang Gorontalo, Ketua Komite Tetap Bidang Keuangan Syariah Kadin Provinsi Gorontalo, Dewan Pembina Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia Komisariat Univ Ichsan Gorontalo 2022-2026, Pengurus APTISI Wiayah XVI Gorontalo Bidang Hubungan Luar Negeri. Intens berinteraksi dengan para akademisi di lingkungan LLDIKTI IX dan XVI. Pernah menulis buku *Teori-Teori Sosial, Social Capital, Paradigma Usaha Tani Tanaman Ternak Terintegrasi Optimal, Konstruksi Teori, Hilirisasi Produk Pertanian Budidaya Cabai (DPTM), Teknologi Produksi Tanaman Sayuran dan Buah & Viotermin Solusi bagi Peternak (DPTM), Koperasi dan Kemitraan Pertanian* dan beberapa buku kolaborasi (*Pengantar Ilmu Pertanian, Pengantar Teknologi Pertanian, Kisah Perjalanan Meraih Doktor, Pengantar Ilmu Biokimia, Klimatologi, Ekonomi Pertanian, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, Pendidikan Pancasila, Asas - Asas Manajemen, Pemasaran Industri, Sosiologi Perkotaan, Perkoperasian, Akuntansi Perbankan Syariah, Pembangunan Pertanian, Penelitian Penyuluhan Pertanian*).

PEMBANGUNAN PEDESAAN

Prinsip, Kebijakan, dan Manajemen

Pembangunan desa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa). UU tersebut menjabarkan definisi, tahapan, dan tujuannya. Terlaksananya pembangunan desa dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang ada di desa. Pembangunan di desa perlu dilaksanakan dengan kerjasama yang baik dan semangat gotong royong antara pemerintah desa dengan masyarakat desa. Semua bahu-membahu memaksimalkan potensi desa yang ada untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Semangat tersebut wajib diimplementasikan di semua tahapan pembangunan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan tujuan untuk lebih memakmurkan kehidupan di desa. Pelaksanaan pembangunan merupakan salah satu agenda yang terus dilakukan pemerintah Desa Amin Jaya setiap tahunnya. Program-program pembangunan tersebut disusun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun lembaga-lembaga pemerintahan desa. Pelaksanaan pembangunan diawali dengan perencanaan serta perancangan melalui sebuah forum musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan lembaga-lembaga masyarakat. Perencanaan pembangunan tentunya harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat, kebutuhan, serta peraturan yang berlaku. UU No.6 Tahun 2014 Pasal 78 ayat 1 menetapkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.